**DAFTAR PUSTAKA**

**SumberBuku**

F.J. Stahl, dikutip oleh Fathurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia,*Bina Cipta, Bandung, 2004.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia,* Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Philipus M Hadjon, dikutif oleh Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia,* Prenada Media, Jakarta, 2005.

Rachmadi Usman, SH, MH, *Hukum Jaminan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Subekti, R, Prof, S.H., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-XVIII, PT Intermasa, Jakarta, 2001.

**PeraturanPerundang-Undangan**

Undang-UndangDasarRepublik Indonesia 1945

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatangan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Sumber Lain**

**Instansi**

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta No. 748 Bandung

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar,Jalan Soekarno Hatta No. 748 Bandung

Kantor Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Barat, Jalan Jakarta No. 27 Bandung.

Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat di Jalan Ir. H. Juanda No. 152 Coblong Bandung

**2. Internet**

Stanley Lesmana, SH, MHum, Asas-asas Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, <http://hukumindonesia-laylay.blogspot.co.id/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, diakses tanggal 13 Januari 2018, pukul 21.30 WIB

<http://www.negarahukum.com/hukum/somasi-atau-teguran.html>. Diakses tanggal 14-1-2018 pukul 10.20 WIB

Teori Sistem Hukum Friedman. <http://juzrifara.blogspot.co.id/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>. Diakses tanggal 14-1-2018 pukul 22.33 WIB.

https://aanmuhsinin.wordpress.com/2013/06/28/eksistensi-perlindungan-hukum-terhadap-kreditor-berdasarkan-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia/; diakses pada tanggal 10-1-2018 pukul 10.36 WIB

<http://hamzahaenurofiq.blogspot.co.id/2014/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. Diakses tanggal 14-1-2018 pukul 11.10 WIB.

<https://wwwmuhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.co.id/2017/03/24-mekanisme-pengawasan-dan-pengujian.html>. Diakses tanggal 11-1-2018.